

**Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan
(Studi Kasus: Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur)**

**SKRIPSI TUGAS AKHIR – 457D5236
PERIODE IV TAHUN 2018/2019**

Sebagai Persyaratan untuk Ujian Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Oleh:

DESTI RAHAYU LATAENA
(D52115009)



DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



**PENGESAHAN
SKRIPSI**

PROYEK : TUGAS SARJANA PROGRAM STUDI PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA

JUDUL : ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
MINAPOLITAN (STUDI KASUS: KECAMATAN MALILI,
KABUPATEN LUWU TIMUR)

PENYUSUN : DESTI RAHAYU LATAENA

NO. STB : D521 15 009

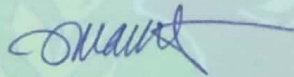
PERIODE : IV-TAHUN 2018/2019

Menyetujui,

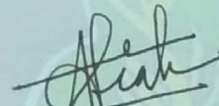
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Mukti Ali, ST., MT., Ph.D
NIP. 19741211 200501 1 001



Sri Aliah Ekawati, ST., MT
NIP. 19850824 201212 2 004

Mengetahui,
Ketua Departemen
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin



Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001



ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS MINAPOLITAN (Studi Kasus: Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)

Desti Rahayu Lataena¹⁾, Mukti Ali²⁾, Sri Aliah Ekawati²⁾

Email: destilataena.dl@gmail.com

¹⁾Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

²⁾Dosen Departemen Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Tujuan perencanaan ini adalah yang pertama mengidentifikasi potensi perikanan yang dapat dikembangkan, yang kedua mengidentifikasi permasalahan infrastruktur kawasan minapolitan malili, yang ketiga merekomendasikan arahan pengembangan zonasi kawasan minapolitan serta arahan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan. Lokasi penelitian berada di Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, studi instansi, dan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis LQ (*Location Quotient*), metode analisis *Supply Chain*, metode analisis *Skala Likert*, metode analisis *Level Of Service*, serta analisis skalogram. Hasil analisis nilai LQ perikanan tangkap yang unggul yaitu tuna, teri, dan cakalang. Adapun perikanan budidaya yang menjadi komoditas unggulan yaitu R.L Gracilaria. Hasil analisis skala likert ketersediaan sarana kawasan minapolitan di kecamatan malili sebesar 75,7%. Adapun hasil analisis skalogram berdasarkan indeks sentralisasi diperoleh hirarki pelayanan I terletak di Desa Wewangriu, Hierarki II terletak di Desa Lakawali, Hierarki III terletak di Desa Atue, Hierarki IV di Desa Balantang, Desa Puncak Indah, Desa Manurung, Desa Tarabbi, Desa Harapan, Desa Baruga, Desa Pongkeru, Desa Ussu, dan Desa Malili. Rekomendasi arahan zonasi kawasan minapolitan yaitu dibagi menjadi 4 (empat) zona yaitu: 1) Zona Inti Minapolis di Desa Wewangriu, 2) Zona penangkapan sentra Desa Lakawali Pantai, 3) Zona pengembangan di Desa Atue, 4) Zona keterkaitan di Desa Balantang, Desa Puncak Indah, Desa Manurung, Desa Tarabbi, Desa Harapan, Desa Baruga, Desa Pongkeru, Desa Ussu, dan Desa Malili.

Kata Kunci : pengembangan, minapolitan, zona, infrastruktur, Luwu Timur



DIRECTION OF THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC AREA OF MINAPOLITAN

(Case Study: Malili District, East Luwu Regency)

Desti Rahayu Lataena¹⁾, Mukti Ali²⁾, Sri Aliah Ekawati²⁾

Email: destilataena.dl@gmail.com

1) Regional and City Planning Study Program Students, Faculty of Engineering, Hasanuddin University

2) Department Lecturer in Regional and City Planning Studies, Faculty of Engineering, Hasanuddin University

ABSTRACT

The purpose of this planning is to first identify the potential of fisheries that can be developed, the second identifies the infrastructure problems of the Minapolitan Malili area, the third recommends the direction of the development of the zoning of the Minapolitan area as well as the direction of the development of the Minapolitan area infrastructure. The research location is in the Minapolitan Region, Malili District, East Luwu Regency. Data collection techniques were carried out in the form of interviews, agency studies, and direct observations in the field. While the analytical method used is the LQ (Location Quotient) analysis method, Supply Chain analysis method, Likert Scale analysis method, Level Of Service analysis method, and scalogram analysis. The results of the analysis of superior LQ value of capture fisheries are tuna, anchovies, and skipjack tuna. The aquaculture which is the leading commodity is R.L Gracilaria. The results of the Likert scale analysis of the availability of minapolitan area facilities in Malili sub-district were 75.7%. The results of the scalogram analysis based on the centralized index obtained by the service hierarchy I are located in Wewangriu Village, Hierarchy II is located in Lakawali Village, Hierarchy III is located at Atue Village, Hierarchy IV in Balantang Village, Puncak Indah Village, Manurung Village, Tarabbi Village, Tarabbi Village, Harapan Village, Desa Harapan Baruga, Pongkeru Village, Ussu Village, and Malili Village. The recommended zoning direction for the Minapolitan area is divided into 4 (four) zones, namely: 1) Minapolis Core Zone in Wewangriu Village, 2) Catching Zone of the center of Lakawali Pantai Village, 3) Development Zone in Atue Village, 4) Linkage Zone in Balantang Village, Village Puncak Indah, Manurung Village, Tarabbi Village, Harapan Village, Baruga Village, Pongkeru Village, Ussu Village, and Malili Village.

Keywords: development, minapolitan, zone, infrastructure, East Luwu



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desti Rahayu Lataena

Nim : D521 15 009

Fakultas/Departemen : Teknik/Perencanaan Wilayah dan Kota

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi “**Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan (Studi Kasus: Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)**” benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 17 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,

Desti Rahayu Lataena



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunianya kita masih selalu mendapat perlindungan. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan proposal ini sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menempuh masa pendidikan Strata Satu (S1) Departemen Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

Penyusunan tugas akhir ini sebagai syarat akademis penyelesaian studi jenjang Strata 1 program studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Sebuah proses tanpa kesalahan ibarat kehidupan tanpa dosa. Kesalahan ini mutlak adanya namun atas berkat petunjuk Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan usaha dan kerja keras serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak maka laporan tugas akhir yang berjudul “**Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan (Studi Kasus: Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur)**” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun terlepas dari semua itu, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini dan penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat demi kemajuan ilmu pengetahuan dan semoga dapat menjadi bahan pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua utamanya di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota.

Gowa, 09 Februari 2019

Penulis



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerahnya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar yang menjadi pembawa lentera ilmu kepada seluruh umat manusia termasuk penulis.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa pihak-pihak yang telah ikhlas membantu baik secara langsung maupun tidak serta memberikan dukungan yang tiada hentihentinya kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pribadi dan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi, antara lain:

1. Kedua Orang Tua Penulis.

Bapak saya **Marthen Lataena**, mama saya **Elvin Mato** yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

2. Saudara-saudara penulis.

Kakak saya **Andri Christo Lataena., ST** terima kasih atas motivasi dan dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama dalam proses penulisan Skripsi ini dan Adik saya **Alfian Rifaldo Lataena** terima kasih juga atas perhatian, kasih sayang, canda tawa dan yang telah membantu penulis dalam survei serta motivasi kepada penulis.

3. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin

4. Pembimbing Tugas Akhir

Bapak **Mukti Ali., ST., MT., Ph.D** selaku pembimbing pertama dan Ibu **Sri Ekawati., ST., MT** selaku pembimbing kedua dan penasehat akademik penulis ibu **Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA**. Penulis mengucapkan



terimakasih yang sebesar-besarnya untuk waktu, tenaga, ilmu dan arahan yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Penguji Tugas Akhir Bapak **Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT** dan **Ibu Dr-Techn. Yashinta Kumala Dewi, ST., MIP**, selaku penguji penulis atas arahan dan motivasinya selama seminar hasil dan seminar tutup penulis.
6. Dosen LBE Waterfront Bapak **Prof. Dr. Ir. Slamet Trisutomo, MS**, Bapak **Mukti Ali., ST., MT., Ph.D**, Ibu **Sri Aliah Ekawati., ST., MT**. Terimakasih atas bimbingan dan motivasinya selama masa LBE dan selama penyusunan tugas akhir.
7. Civitas Akademika Prodi Pengembangan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin:
 - a. Ibu **Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin., M.Si**, selaku ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
 - b. Kepala studio Ibu **Dr. Tech. Yashinta Kumala Dewi Sutopo. ST., MIP** terimakasih untuk arahan dan bimbingannya selama penulis menjalani kegiatan di studio akhir.
 - c. Seluruh staf kepegawaian Prodi Pengembangan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, **Pak Hairul, Pak Arman, Pak Jhon, dan Pak Sawali** Telah banyak membantu dalam bidang pengurusan kelengkapan administrasi.
 - d. Bapak Ibu Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota yang tidak sempat disebutkan namanya, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menjalani perkuliahan di **Universitas Hasanuddin**.
8. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
 - a. Bapak **Ir. H. Muhammad Thorig Husler** selaku Bupati Luwu Timur dan Bapak **Irwan Bachri Syam, ST** selaku wakil Bupati Luwu Timur.
 - b. Bapak **Najamuddin** selaku Anggota DPRD Dapil I Kabupaten Luwu Timur telah banyak membantu dalam penelitian penulis.



- c. Kepada **Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur** yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis dalam pengambilan data.
 - d. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis dalam pengambilan data.
9. Kerabat dan Rekan-rekan Penulis
- a. Kepada teman-teman seperjuangan dari maba yaitu selalu ada di saat suka dan duka penulis **Yola Amalia Ayuningsih, Miftahunnisa Rusli, Ratih Puspitasari, Nurfadila, Nurwajehi, Rahmatullah Hasan**. Terima kasih kepada kalian yang memberikan warna, pelajaran, kesabaran, dan semuanya kepada penulis.
 - b. Teman-teman Studio Akhir PWK periode IV tahun 2018/2019, **Misra, Ichsan Caesar Pratama, Muhammad Fadel, Khoril, Yola Amalia Ayuningsih**, dan seluruh teman-teman studio akhir yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, yang saling memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir.
 - c. Teman-teman PWK'15 lainnya (C.ST Aamiin), **Aspar, Mursaling, Cica, Maul, Syafi'i, Wahid, Alif, Ulla, Afif, Gusti, Brily, Rodrick, Dimas, Imam, Albab** dan semua teman-teman PWK'15 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya .
 - d. Teman-Teman KKN Tematik Infrastruktur PUPR Gelombang 99 Kabupaten Wajo, terutama teman-teman posko 2 Kelurahan Maddukelleng, **Kak Didi** (Teknik PWK), **Yogi** (Hukum), **Iqbal** (Teknologi pertanian), **Mala** (Pertanian), **Novi** (Perikanan), dan **Serli** (Mipa), **Musmiana** (Teknik industri). Terima kasih atas suka duka yang dilalui selama hampir dua bulan serta bantuan, kerja sama dan semangatnya.
 - e. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pengembangan Wilayah dan Kota **HMPWK FT-UH**), terima kasih untuk semuanya. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dengan tulus.



Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan khususnya pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Mari terus berkarya untuk hari ini, esok dan nanti. Semoga apa yang telah kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari-Nya.

Gowa, 09 Februari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4 Ruang Lingkup Wilayah	3
1.5 Sistematika Penulis	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kawasan Minapolitan.....	5
2.1.1 Pengertian Minapolitan.....	5
2.1.2 Karakteristik Kawasan Minapolitan	7
2.1.3 Persyaratan Kawasan Minapolitan	7
2.1.4 Batasan Kawasan Minapolitan	11
2.1.5 Penetapan Kawasan Minapolitan.....	12
2.1.6 Penataan Ruang Kawasan Minapolitan	13
2.2 Infrastruktur Minapolitan	14
2.3 Studi Banding	21
2.3.1 Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas.....	21
2.3.2 Kawasan Minapolitan Kabupaten Pandeglang	23
2.3.3 Penelitian Terdahulu	29
2.3.4 Kerangka Pikir.....	37



BAB III METODE PERENCANAAN

3.1	Lokasi Perencanaan	38
3.2	Jenis dan Sumber Data	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data	40
3.4	Variabel Perencanaan	41
3.5	Teknik Analisis Data	43
3.6	Kerangka Perencanaan	54
3.7	Definisi Operasional	55

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	56
4.1.1	Keadaan Geografis dan Demografi	56
4.1.2	Kondisi Fisik Dasar	57
4.1.3	Demografi	58
4.2	Gambaran Umum Lokasi Perencanaan	59
4.2.1	Keadaan Geografis dan Batas Wilayah	59
4.2.2	Kondisi Fisik Dasar	59
4.2.3	Kependudukan	59
4.2.4	Pola Penggunaan Lahan	60
4.2.5	Potensi Perikanan di Kecamatan Malili	61
4.2.6	Kondisi Usaha Minabisnis	62
4.2.7	Sarana dan Prasarana Kawasan Minapolitan	64

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Potensi Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili	81
5.1.1	Analisis Rumah Tangga Perikanan	81
5.1.2	Analisis Komoditi Unggulan	83
5.1.3	Analisis <i>Supply Chain</i>	85
5.2	Analisis Permasalahan Kawasan Minapolitan	87
5.2.1	Analisis Ketersediaan Infrastruktur Sarana Kawasan Minapolitan	87
	Analisis Aksesibilitas Kawasan Minapolitan	89
	Analisis Ketersediaan Jaringan Utilitas Kawasan Minapolitan	93
	Analisis Skalogram	99



BAB VI ARAHAN PERENCANAAN

6.1	Rencana Penetapan Kawasan Minapolitan	106
6.2	Rencana Struktur Ruang Kawasan Minapolitan	107
6.3	Rencana Sistem Keterkaitan Antar sektor di tingkat pusat.....	116
6.3.1	Rencana Pengembangan Aksesibilitas Kawasan Minapolitan.....	116
6.4	Rencana Jaringan Utilitas	118

BAB VII PENUTUP

7.1	Kesimpulan	131
7.2	Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA	133
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Arahan Pengembangan Struktur Ruang Kawasan Minapolitan Kecamatan Panimbang-Sumur	26
Tabel 2.2	Kesimpulan Studi Banding.....	28
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Waktu Perencanaan	38
Tabel 3.2	Tabel Kebutuhan Data.....	42
Tabel 3.3	Skoring pada Indikator Ketersediaan	45
Tabel 3.4	Kriteria Penilaian Jalan	46
Tabel 3.5	Kriteria Penilaian Drainase	47
Tabel 3.6	Kriteria Penilaian Air Bersih.....	48
Tabel 3.7	Kriteria Penilaian Listrik.....	48
Tabel 3.8	Kriteria Penilaian Sampah.....	49
Tabel 3.9	Matriks Skalogram untuk Mengetahui Hirarki dan Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan Minapolitan	52
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur 2016.....	57
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur	58
Tabel 4.3	Luas dan Jenis Penggunaan Lahan.....	61
Tabel 4.4	Luas Lahan dan Produksi	62
Tabel 4.5	Kondisi Jaringan Jalan	75
Tabel 5.1	Jumlah Rumah Tangga Perikanan.....	81
Tabel 5.2	Perhitungan Proyeksi Rumah Tangga Perikanan 2018-2037.....	82
Tabel 5.3	Proyeksi Penduduk Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili 2018-2017.....	83
Tabel 5.4	Nilai LQ Komoditi Perikanan Tangkap	83
Tabel 5.5	Nilai LQ Komoditi Perikanan Darat	84
	Skoring Indikator Ketersediaan Sarana Berdasarkan Hasil Penelitian.....	87
	Evaluasi Ketersediaan Jalan Poros Malili	90



Tabel 5.8	Evaluasi Ketersediaan Jalan Desa Lakawali	90
Tabel 5.9	Evaluasi Ketersediaan Jalan Menuju TPI Lakawali.....	91
Tabel 5.10	Evaluasi Ketersediaan Jalan Menuju PPI Malili	92
Tabel 5.11	Evaluasi Ketersediaan Drainase Sungai Malili di Desa Atue	94
Tabel 5.12	Evaluasi Ketersediaan Drainase Sungai Malili di Desa Lakawali	94
Tabel 5.13	Evaluasi Ketersediaan Listrik Kecamatan Malili.....	95
Tabel 5.14	Tingkat Ketersediaan Air Bersih Kecamatan Malili	96
Tabel 5.15	Tingkat Ketersediaan Prasarana Persampahan.....	96
Tabel 5.16	Sumber Sampah dan Jenis Peralatan.....	97
Tabel 5.17	Estimasi Timbulan Sampah Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili	98
Tabel 5.18	Matriks Skalogram Sebaran Sarana dan Prasarana Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili.....	100
Tabel 5.19	Matriks Skalogram Sebaran Sarana dan Prasarana Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili.....	101
Tabel 5.21	Matriks Indeks Sentralisasi Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili	102
Tabel 5.19	Hirarki Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili	108
Tabel 5.23	Hirarki Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili	109
Tabel 6.1	Jaringan Jalan Arteri Sekunder yang direncanakan	119
Tabel 6.2	Jaringan Jalan Kolektor dan Jalan Lokal yang direncanakan	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Abstraksi Kawasan Minapolitan.....	6
Gambar 2.2	Peta Zonasi Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas	22
Gambar 2.3	Rencana Struktur Ruang Minapolitan Panimbang	23
Gambar 2.4	Rencana Struktur Kawasan Minapolitan Sumur	23
Gambar 2.5	Peta Zona Inti Minapolitan Pelabuhanratu.....	31
Gambar 2.6	Kerangka Pikir.....	37
Gambar 3.1	Peta Administrasi Lokasi Perencanaan	39
Gambar 3.2	Kerangka Perencanaan	54
Gambar 4.1	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	60
Gambar 4.2	Grafik Produksi Hasil Perikanan Tangkap 2017	62
Gambar 4.3	Balai Pertemuan Nelayan di Kompleks PPI, di Desa Wewangriu	65
Gambar 4.4	Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Malili	66
Gambar 4.5	Koperasi Mina Bahari di Desa Wewangriu.....	67
Gambar 4.6	Pabrik Es Malili di Desa Wewangriu	67
Gambar 4.7	Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Desa Wewangriu	68
Gambar 4.8	Lapangan Penjemuran Ikan dan Rumput Laut di Desa Wewangriu	69
Gambar 4.9	Bangsas Pengolahan Ikan di Desa Wewangriu.....	69
Gambar 4.10	Gudang Penyimpanan Rumput Laut di Desa Wewangriu.....	70
Gambar 4.11	Sarana Pembenuhan di Kecamatan Malili.....	71
Gambar 4.12	Peta Sarana Kawasan Minapolitan	72
Gambar 4.13	Jaringan Air Bersih di Kecamatan Malili.....	77
Gambar 4.14	TPS di Kecamatan Malili	78
Gambar 4.15	Prasarana Dermaga Kecamatan Malili.....	79
Gambar 4.16	Peta Prasarana Kawasan Minapolitan	80
Gambar 5.1	Grafik Nilai LQ Komoditi Perikanan Tangkap	84
Gambar 5.2	Grafik Nilai LQ Perikanan Budidaya.....	85
Gambar 5.3	Pola Distribusi Hasil Perikanan Tangkap Kawasan Minapolitan Malili	86



Gambar 5.4	Peta Analisis Jaringan Jalan	93
Gambar 6.1	Peta Arahan Penetapan Kawasan	108
Gambar 6.2	Peta Aksesibilitas Zona	109
Gambar 6.3	Peta Arahan Zona Inti Desa Wewangriu	110
Gambar 6.4	Peta Arahan Zona Penangkapan Desa Lakawali Pantai	111
Gambar 6.5	Peta Arahan Zona Pengembangan Desa Atue	112
Gambar 6.6	Peta Arahan Zona Keterkaitan.....	113
Gambar 6.7	Site Plan Perumahan Nelayan PPI Malili.....	114
Gambar 6.8	Peta Arahan Struktur Ruang Kawasan Minapolitan.....	117
Gambar 6.9	Peta Arahan Jaringan Jalan.....	119
Gambar 6.10	Peta Arahan Peningkatan Kualitas Dermaga.....	120
Gambar 6.11	Peta Arahan Jaringan Drainase.....	122
Gambar 6.12	Peta Arahan Jaringan Listrik	123
Gambar 6.13	Skema Pengelolaan Sampah Kawasan Minapolitan Kecamatan Malili	125
Gambar 6.14	Peta Arahan Persampahan	129
Gambar 6.15	Arahan Alur Distribusi	130



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.PER. 12/MEN/2010 Tentang Minapolitan disebutkan bahwa minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Secara umum Minapolitan terdiri dari dua kata mina artinya perikanan dan politan yang artinya kota, jadi Minapolitan adalah Kota Perikanan. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan menetapkan 179 Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan pada 33 Provinsi. Terdiri atas 145 perikanan budidaya dan 57 perikanan tangkap.

Salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan strategis minapolitan di Indonesia yakni Kabupaten Luwu Timur yang terletak di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu, dan Kecamatan Burau. Hal ini sesuai dengan visi kabupaten yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur yakni pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis pada sumber daya yang dimiliki daerah dan itu telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang menjelaskan mengenai pengembangan dermaga dan fasilitas perikanan nusantara terpadu untuk mengoptimalkan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengembangan kawasan minapolitan.

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas kawasan minapolitan seluas 1.455,19 km² atau 20,95% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur sebesar 6.944,88 km². Kabupaten Luwu Timur memiliki panjang garis pantai 117,4 km² serta luas perairan otonomi 48.050 km² pada empat kecamatan pesisir meliputi Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu, dan Kecamatan Burau dengan 17 desa

663 rumah tangga pesisir (RTP) nantinya akan dikelola dengan berbagai pengelolaan. Selain itu, potensi tambak seluas daerah penangkapan 1 ha yang didukung luas budidaya perikanan 10.841 ha. Khusus



Kecamatan Malili memiliki produksi tangkap dan perikanan budidaya sebesar 1.835 ton perikanan tangkap dan 6.012,24 ton perikanan budidaya, pengolahan 287,6 ton (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2017). Potensi yang besar ini tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta sangat diperlukan penataan ruang kawasan sekitar Kawasan Minapolitan dan rencana pola pemanfaatan ruang pesisir. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan pengembangan hasil perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan produksi hingga distribusi hasil perikanan di kawasan minapolitan tentunya menuntut rencana struktur ruang kawasan pesisir dikembangkan dengan mengakomodasi konsep struktur ruang minapolitan yang telah menjadi pedoman sektoral di Kabupaten Luwu Timur yang bertumpu pada penetapan pusat pertumbuhan dan pelayanan serta sentra-sentra produksi yang menjadi acuan dalam pengembangan minapolitan.

Kenyataannya pada studi kasus yang berada di Kecamatan Malili sebagai pusat Kawasan Minapolitan Kabupaten Luwu Timur mempunyai masalah terkait pembagian zona karena Kawasan Minapolitan yang ada di Kabupaten Luwu Timur belum dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada di Kawasan Minapolitan.

Untuk itu, perlu dilakukan perencanaan yang baik terkait zonasi kawasan minapolitan serta pengembangan penataan ruang kawasan minapolitan dan rencana pola pemanfaatan ruang pesisir minapolitan di Kecamatan Malili. Hal ini ditunjukkan agar konsep minapolitan dapat didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi kebutuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.2 Rumusan Masalah

Kecamatan Malili sebagai pusat Kawasan Minapolitan Kabupaten Luwu Timur mempunyai masalah terkait zonasi kawasan minapolitan belum dilengkapi dengan fasilitas. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menganalisis potensi dan lahan yang terdapat di Kecamatan Malili yang dapat dikembangkan dalam Kawasan Minapolitan Malili. Adapun rumusan masalah sebagai



1. Apa potensi yang dapat dikembangkan di kawasan minapolitan Kecamatan Malili?
2. Bagaimana arahan permasalahan infrastruktur kawasan minapolitan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pengembangan kesejahteraan di Kecamatan Malili?
3. Bagaimana arahan pengembangan zonasi kawasan strategis minapolitan Kecamatan Malili?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari perencanaan ini yakni:

1. Mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan di kawasan minapolitan Kecamatan Malili;
2. Merumuskan arahan permasalahan infrastruktur kawasan minapolitan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pengembangan kesejahteraan di Kecamatan Malili;
3. Merumuskan arahan pengembangan zonasi kawasan strategis minapolitan di Kecamatan Malili.

Sehingga diharapkan dapat diperoleh manfaat berupa:

1. Bagi pemerintah, diharapkan perencanaan ini mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penataan ruang kawasan minapolitan dan rencana pola pemanfaatan ruang pesisir minapolitan di Kecamatan Malili;
2. Bagi Masyarakat, diharapkan perencanaan ini mampu menjadi referensi terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan.

1.4 Ruang Lingkup Perencanaan

1.4.1 Ruang lingkup wilayah perencanaan

Ruang lingkup wilayah perencanaan ini yakni wilayah inti/pusat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten dengan luas wilayah 92.120 Ha. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada yang merupakan penghasil perikanan terbanyak yang tidak didukung oleh fasilitas penunjang kawasan minapolitan.



1.4.2 Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini mengenai pengembangan kawasan strategis minapolitan. Rumusan masalah pertama mengenai potensi kawasan minapolitan yang terdiri dari tiga variabel yaitu perumahan nelayan, produksi perikanan, dan distribusi pemasaran kawasan minapolitan, serta permasalahan kawasan minapolitan yang terdiri dari dua variabel yaitu sarana kawasan minapolitan dan prasarana kawasan minapolitan. Adapun rumusan masalah kedua membahas mengenai arahan pengembangan kawasan minapolitan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: Bab ini akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan perencanaan, manfaat perencanaan, lingkup perencanaan, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Bab ini memuat tentang komponen dan kerangka teori yang dikaji terkait minapolitan dan infrastruktur sarana dan prasarana kawasan minapolitan serta studi banding yang digunakan.

BAB III Metode Perencanaan: Bab ini dibahas tentang lokasi perencanaan dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, kebutuhan data, variabel perencanaan, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV Gambaran Umum: Bab ini dibahas tentang gambaran umum tentang wilayah perencanaan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi perikanan hingga sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut.

BAB V Hasil Dan Pembahasan: Bab ini memuat hasil perencanaan yang diperoleh penulis berupa data sekunder maupun data primer. Lalu data tersebut dijabarkan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah di bab sebelumnya. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai bahan untuk perencanaan.

BAB VI Arahan Perencanaan: Bab ini dibahas tentang perencanaan yang akan digunakan dalam mengatasi permasalahan yang telah dibahas di bab sebelumnya yang berlandaskan hasil analisis.

Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait perencanaan yang

1.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kawasan Minapolitan

2.1.1 Pengertian Minapolitan

Istilah Minapolitan mengandung dua unsur kata yakni Mina yang berarti perikanan dan Politan yang berarti kota sehingga biasa dikenal dengan istilah Kota Perikanan. Minapolitan ini sendiri mampu dipandang dalam dua hal yaitu minapolitan sebagai sebuah konsep pembangunan dalam sebuah wilayah khususnya pedesaan dan minapolitan sebagai sebuah kawasan pengembangan.

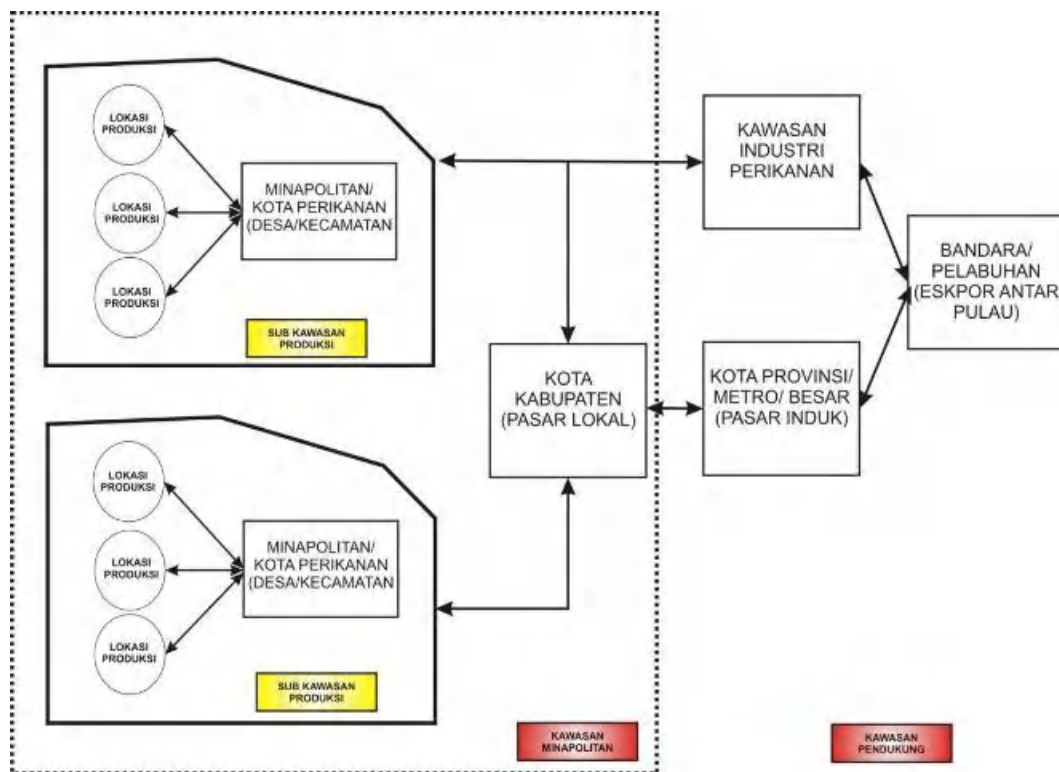
Bila ditinjau dari segi konsep maka dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.PER.12/MEN/2010 Tentang Minapolitan disebutkan bahwa minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan bila dipandang sebagai sebuah kawasan maka telah dijelaskan dalam Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2009 bahwa minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Keberadaan kawasan minapolitan ini umumnya berada di wilayah pedesaan yang memiliki satu atau lebih pusat kegiatan yang menjurus pada kegiatan minabisnis di wilayah tersebut. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. (Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan No 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

Konsep Minapolitan didasarkan pada tiga asas yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan intervensi negara secara terbatas (*limited state intervention*), serta penguatan dengan prinsip: daerah kuat–bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan



dan perikanan agar pemanfaatan sumber dayanya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dengan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi kedua hal tersebut. Sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan adalah pelabuhan perikanan. Sementara itu, penggerak utama minapolitan di bidang perikanan budidaya adalah sentra produksi dan tujuh perdagangan perikanan di lahan-lahan budidaya produktif. Sentra produksi pengolahan ikan dan perdagangan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan, juga dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan. Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Abstraksi Kawasan Minapolitan

Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan, Departemen Perikanan dan Kelautan, 2009



2.1.2 Karakteristik Kawasan Minapolitan

Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan suatu kawasan minapolitan sebaiknya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
2. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
3. Kawasan minapolitan harus bisa tumbuh dan berkembang sebagai kawasan mandiri;
4. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya;
5. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

2.1.3 Persyaratan Kawasan Minapolitan

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan;
 2. Memiliki komoditas unggulan dibidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi, meliputi:
 - a. Keberadaan komoditas unggulan, yaitu melimpah atau dapat dibudidayakan dengan baik dengan prospek pengembangan tinggi di masa depan;
 - b. Nilai perdagangan komoditas tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki pasar: lokal, nasional dan internasional;
 - 2) Volume atau kemampuan produksi tinggi: dapat atau berpotensi memenuhi permintaan pasar;
- Tingkat produktivitas tinggi: kemampuan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi atau dapat dikembangkan sehingga secara ekonomi menguntungkan;



- 4) Jumlah pelaku utama/usaha perikanan relatif besar atau sebagai besar penduduk setempat bekerja di kawasan tersebut;
 - 5) Mempunyai keunggulan komparatif: mempunyai nilai lebih karena keberadaan komoditas, iklim, SDM, dan ongkos produksi murah;
 - 6) Mempunyai keunggulan kompetitif: produk berkualitas dan sistem pemasaran efektif.
3. Letak geografis kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, meliputi:
- a. Lokasi kawasan strategis
 - 1) Jarak dan sistem transportasi; dan
 - 2) Mempunyai akses terhadap jaringan pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran (mata rantai pemasokan – *supply chain*)
 - b. Kawasan yang secara alami cocok untuk usaha kelautan dan perikanan
 - 1) Potensi sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) Kesesuaian lahan dan potensi sumber daya air;
 - 3) Sarana dan prasarana perikanan (Pelabuhan Perikanan, BBI, *Cold Storage*, pabrik es dll);
 - 4) Dekat dengan *fishing ground*;
 - 5) Sentra produksi garam; dan
 - 6) Sentra pengolahan dan pemasaran.
4. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan dan atau pemasaran yang saling terkait, meliputi:
- a. Sistem dan mata rantai produksi perikanan budidaya
 - 1) Keberadaan sejumlah unit produksi ikan budidaya yang aktif berproduksi dan terkonsentrasi di sentra produksi; dan

Mata rantai produksi:

 - a) Keberadaan sarana atau lahan produksi: kolam dan tambak yang luas;



- b) Fasilitas pengairan yang baik dan mencukupi atau potensi pengairan yang mungkin dikembangkan;
 - c) Ketersediaan benih berkualitas tinggi atau kemungkinan pengadaan benih dengan harga murah;
 - d) Ketersediaan pakan dan obat-obatan murah;
 - e) Telah diterapkan sistem budidaya yang baik sehingga tingkat produksinya cukup tinggi dan berkualitas;
 - f) Keterlibatan pembudidayaan dan para pekerjaan setempat;
 - g) Sistem distribusi dan pemasaran yang telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
 - h) Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
- b. Sistem dan mata rantai produksi perikanan tangkap
- 1) Keberadaan sejumlah kapal ikan yang aktif memproduksi dan mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi tersebut; dan
 - 2) Mata Rantai Produksi:
 - a) Hasil tangkapan yang cukup besar dan mempunyai skala ekonomi cukup tinggi;
 - b) Keberadaan sarana tambat, air bersih, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang memadai;
 - c) Sistem bongkar muat yang memadai atau mungkin dikembangkan dalam waktu dekat;
 - d) Keterlibatan nelayan dan para pekerja setempat;
 - e) Kegiatan di lokasi/pelabuhan perikanan/TPI mempunyai skala ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di sekitarnya;
 - f) Sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
 - g) Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.



- c. Sistem dan mata rantai produksi hilir
- 1) Keberadaan unit-unit pengolahan atau potensi pengembangannya dalam waktu dekat;
 - 2) Keberadaan kelembagaan/SDM pengawasan mutu;
 - 3) Sistem tata niaga produksi hasil olahan dan fasilitas pendukungnya;
 - 4) Keberadaan fasilitas pasar atau sistem pemasaran produk; dan
 - 5) Sistem dan sarana distribusi (logistik) produk di dalam maupun di luar kawasan.
5. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan, meliputi:
- a) Permodalan: aksesibilitas modal bagi nelayan, pembudidayaan ikan, serta pengolah dan pemasaran ikan;
 - b) Kelembagaan: lembaga pemerintahan daerah;
 - c) Lembaga usaha: koperasi, kelompok usaha atau usaha skala menengah dan atas;
 - d) Penyuluhan dan pelatihan: lembaga dan SDM Penyuluhan dan Pelatihan;
 - e) Prasarana pengairan: keberadaan jaringan pengairan (budidaya) utama/primer, sekunder atau lainnya sebagai pendukung sistem pengairan di kawasan;
 - f) Energi: jaringan listrik yang memadai; dan
 - g) Teknologi tepat guna: Penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saingan.
6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan, meliputi:
- a. Kondisi sumberdaya alam (daya dukung dan daya tampung);

dampak atau potensi dampak negatif terhadap lingkungan; dan sesuai tata ruang daerah dan nasional.



7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengolahan dan pengembangan minapolitan, meliputi:
 - a. Sesuai Renstra dan Tata Ruang Daerah (RTRW Kabupaten/Kota), RTRW Provinsi dan RTRW Nasional;
 - b. Mempertimbangkan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K);
 - c. Masuk dalam RPJMD;
 - d. Ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - e. Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
 - f. Kontribusi anggaran APBD atau sumber dana lain yang sah;
 - g. Keberadaan kelembagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai; dan
 - h. Berkoordinasi dengan provinsi dan pusat.
8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan, meliputi:
 - a. Keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. Kelompok kerja yang menangani pengembangan kawasan minapolitan.
9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan, meliputi:
 - a. Mempunyai data dan informasi mengenai sumber daya kelautan dan perikanan serta data dan informasi terkait; dan
 - b. Mempunyai sistem pencatatan data statistik dan geografis di bidang kelautan dan perikanan.

2.1.4 Batasan Kawasan Minapolitan

Batasan suatu kawasan minapolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya)

yang ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale* adalah faktor-faktor yang menyebabkan rata-rata biaya produksi suatu barang semakin menurun dengan meningkatnya jumlah output yang diproduksi semakin meningkat dan *economic of scope*



adalah faktor-faktor yang menyebabkan semakin murahnya biaya memproduksi berbagai barang secara bersama-sama dibandingkan dengan memproduksi tiap-tiap barang secara sendiri-sendiri. Karena itu, penetapan kawasan minapolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan minabisnis yang ada di setiap daerah. Dengan demikian bentuk dan luasan kawasan minapolitan dapat meliputi suatu wilayah desa/kelurahan atau kecamatan atau beberapa kecamatan dan alam kabupaten/kota atau dapat juga meliputi wilayah yang dapat menembus wilayah kabupaten/kota lain berbatasan. Kotanya dapat berupa kota desa atau kota kecamatan atau kota kecil atau kota menengah.

2.1.5 Penetapan Kawasan

Tujuan penataan ruang kawasan minapolitan adalah memperkuat hubungan antar pusat dan meningkatkan akses bagi barang, produk dan orang, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi dengan penghematan waktu juga biaya angkut. Adapun zona-zona pemanfaatan ruang di kawasan minapolitan adalah:

- a. Minapolis/zona inti adalah pusat kegiatan minapolitan yang merupakan sentra pelayanan dan jasa. Pada perikanan budidaya minapolis bisa berupa ibu kota kecamatan yang merupakan pusat kegiatan pelayanan dan jasa, dan pada perikanan tangkap zona inti merupakan pelabuhan perikanan dan sentra nelayan untuk perairan;
- b. Sentra produksi/zona penangkapan adalah sentra penghasilan produk perikanan;
- c. Zona pengembangan dan pendukung adalah wilayah di luar zona inti yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha berbasis perikanan dan berintegrasi dengan usaha penangkapan ikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
- d. Zona Keterkaitan
 1. Pusat kawasan (berupa kota kecil/ibu kota kecamatan) untuk perikanan tangkap pusat kawasannya adalah pelabuhan/sentra nelayan (perairan dan darat);



2. Pusat dari kawasan sentra produksi (satu desa maju) untuk perikanan budidaya sedangkan untuk perikanan Tangkap pelabuhan/sentra nelayan dengan skala lebih kecil;
3. Desa pengumpul (berupa pusat permukiman penduduk sebagai tempat pengumpul komoditi).

2.1.6 Penataan Ruang Kawasan Minapolitan

Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Perencanaan tata ruang sendiri berarti suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Sementara itu, pemanfaatan ruang berarti upaya untuk mewujudkan struktur ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan. Sedangkan, pengendalian pemanfaatan ruang ialah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (UU No. 26 Tahun 2007).

Rencana struktur pemanfaatan ruang pada kawasan minapolitan meliputi hirarki pusat pelayanan kawasan seperti sistem pusat-pusat produksi perikanan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal.

Rencana pola pemanfaatan ruang pada kawasan minapolitan (Dirjen Perikanan Budidaya, 2009) menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan kawasan budidaya maupun kawasan lindung. Isi rencana pola pemanfaatan ruang adalah batas-batas kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan kawasan lainnya, di dalam kawasan budidaya dan deliniasi kawasan lindung.

Adapun fungsi struktur ruang dalam kawasan Minapolitan adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Satuan Kawasan Perikanan

...t satuan kawasan dalam lingkup kawasan minapolitan berperan sebagai ...ota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah kawasan maupun ...e luar dari daerah kabupaten dan provinsi;



2. Pusat berbagai kegiatan *final manufacturing* industri perikanan (*Packing*) stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditi;
3. Pusat berbagai pelayanan (*general agroindustri service*).

b. Pusat Distrik Minapolitan (Pusat Pertumbuhan)

Pusat distrik minapolitan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan perdagangan, agribisnis beserta pelayanannya. Adapun peran pusat distrik minapolitan sebagai berikut:

1. Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditi sejenis;
2. Pusat kegiatan agrobisnis berupa pengolahan komoditas jadi dan setengah jadi serta kegiatan-kegiatan agribisnis;
3. Pusat pelayan agroindustri khusus, pendidikan, pelatihan dan pengembangan komoditas unggulan.

c. Kota Mina Utama (Sentra Produksi)/Minapolis

Penentuan kota tani utama didasarkan atas perkembangan ekosistem serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki setiap wilayah.

Adapun peran kota tani utama adalah sebagai berikut:

1. Pusat koleksi komoditas perikanan sebagai bahan mentah industri.
2. Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian.
3. Pusat penelitian, pembenihan dan percontohan komoditas.
4. Koperasi dan informasi pasar barang dagangan.

d. Hinterland

Daerah *hinterland* (sub sentra produksi) meliputi seluruh desa pantai yang terdapat di kecamatan-kecamatan dalam kawasan minapolitan. Fungsi daerah hinterland adalah sebagai pemasok hasil produksi dalam kawasan.

2.2 Infrastruktur Minapolitan

Konsep minapolitan pada prinsipnya sama dengan konsep agropolitan.

Untuk itu, penjelasan tentang infrastruktur minabisnis berikut ini, menggunakan

infrastruktur agrobisnis sebagaimana dikutip dari Masterplan Agropolitan dan Pangalengan Kab. Bandung 2006-2010.



Infrastruktur minapolitan diarahkan mendukung pengembangan sistem dan usaha minabisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan sentra produksi perikanan (minapolitan), yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi

Sarana Produksi bertujuan untuk menunjang subsistem produksi dalam rangka meningkatkan usaha budidaya perikanan. Jenis sarana produksi dapat berupa:

- a. Sarana perbenihan
- b. Kios sarana produksi perikanan (saprotan)
- c. Gudang penyimpanan saprotan
- d. Subterminal saprotan
- e. Subterminal pengumpul

2. Sarana Pengolahan

Sarana pengolahan bertujuan untuk mendukung subsistem pengolahan berupa industri-industri pengolahan hasil perikanan sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis sarana pengolahan dapat berupa:

- a. Gudang penyimpanan hasil seperti sarana pengawetan/pendinginan;
- b. Sarana pengolahan hasil perikanan seperti tempat pengemasan, sarana industri-industri rumah tangga termasuk *food service*, seperti pembuatan krupuk, dodol, jus, bubuk/tepung, produk segar supermarket, dan lain-lain.

3. Sarana Pemasaran

Sarana pemasaran bertujuan untuk mendukung subsistem pemasaran hasil perikanan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, dan informasi pasar. Jenis sarana pemasaran dapat berupa:

- a. Sarana pemasaran dan perdagangan hasil perikanan seperti: pasar tradisional, kios cinderamata, dan tempat pelelangan ikan;
- b. Terminal minabisnis.

4. Sarana Jasa Penunjang

Sarana jasa penunjang bertujuan untuk menyediakan jasa bagi subsistem perikanan. Termasuk ke dalam subsistem ini adalah penelitian dan pengembangan, manajemen, asuransi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, sistem informasi



dan dukungan kebijaksanaan pemerintah (mikro ekonomi, tata ruang, dan makro ekonomi). Jenis sarana jasa penunjang dapat berupa:

- a. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan minabisnis.
- b. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan koperasi usaha bersama, dan perbankan.
- c. Sarana balai penelitian, pendidikan dan penyuluhan.

5. Jalan

Pengertian Jalan, menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam Pasal 7 UU No. 38 Tahun 2004, sistem jaringan jalan dibagi atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jalan distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sedangkan, sistem jaringan jalan sekunder merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Menurut statusnya, jalan dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa (UU No.38 Tahun 2004). Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar kabupaten/kota. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan



lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Adapun bagian-bagian jalan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 ialah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luas ruang manfaat jalan. Dan, ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

6. Drainase

Jaringan drainase merupakan saluran yang dibuat untuk mengalirkan air buangan pada suatu daerah, misal karena air berlebih ketika hujan. Adapun fungsi dari drainase menurut Robert J.Kodoatie (2005) ialah:

- a. Membebaskan suatu wilayah (terutama padat permukiman) dari genangan air, erosi dan banjir;
- b. Karena aliran lancar maka drainase juga berfungsi memperkecil resiko kesehatan lingkungan; bebas dari malaria (nyamuk) dan penyakit lainnya;
- c. Kegunaan tanah permukiman padat akan menjadi lebih baik karena terhindar dari kelembaban;
- d. Dengan sistem yang baik, tata guna lahan dapat dioptimalkan dan juga memperkecil kerusakan-kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan-bangunan lainnya.

7. Jaringan Air Bersih

air bersih menurut SK MENKES No. 416/MENKES/PER/IX/1990 ialah air digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.



Menurut Kodoatie (2005), sistem infrastruktur air bersih secara umum dapat dijelaskan berikut ini.

- a. Eksplorasi sumber daya air
 - 1) Sumber daya air permukaan (sungai, danau, waduk, dll).
 - 2) Sumber daya air tanah (sumur, pemompaan, dll).
- b. Pengolahan
 - 1) Penjernihan dari partikel lain (*sedimentation, flocculation, filtration, dll*).
 - 2) Pengontrolan bakteri air (*disinfection, ultra violet ray, ozone treatment, dll*).
 - 3) Komposisi kimia air (*aeration, iron dan manganese removal, carbon actived, dll*).
- c. Penampungan
 - 1) Penampungan bahan baku air (waduk, sungai/*long storage*).
 - 2) Penampungan bahan baku air olahan (tangki tertutup, kolam terbuka, dll).
- d. Transmisi
 - 1) Truk tangki, kapal tanker dan moda lain (ada resiko kehilangan, tidak dapat menjamin tepat waktu, debit dan kualitas).
 - 2) Jaringan pipa transmisi dari primer ke sekunder.
 - 3) Bak pelepas tekan.
 - 4) Pipa (minimum kehilangan, dapat menjamin tepat waktu, debit dan kualitas).
- e. Jaringan distribusi ke pelanggan: sistem jaringan pipa, sistem tampungan, *Fittings, Control, Valve*, dan Pompa.

Kebutuhan air bersih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan air bersih domestik dan kebutuhan air bersih non-domestik. Kebutuhan air bersih domestik ialah kebutuhan air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Kebutuhan air bersih domestik sangat ditentukan oleh jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Olehnya itu, untuk memprediksi kebutuhan air domestik di suatu daerah dapat dilakukan melalui proyeksi penduduk.



Sedangkan kebutuhan air non-domestik ialah kebutuhan air yang digunakan untuk pemanfaatan komersial, kebutuhan institusi dan kabutuhan industri.

8. Persampahan

Sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Sementara itu Kodoatie (2005) mendefinisikan sampah sebagai limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Adapun sumber limbah padat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 ialah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dimaksud ialah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga ialah berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkahan bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pengumpulan sampah merupakan kegiatan awal dari urutan/proses pengelolaan persampahan/kebersihan disamping kegiatan pewardahan yang merupakan tanggung jawab dari penghasil/sumber sampah. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan sampah sampai ke tempat pembuangan adalah sebagai berikut (Kodoatie, 2005).

- a) Sumber sampah
- b) Waktu pengumpulan
- c) Pemilihan peralatan
- d) Petunjuk rute pengangkutan

Perkiraan jumlah sampah
Waktu pengangkutan
Kebutuhan tenaga kerja



h) Tempat pembuangan akhir (TPA)

Adapun asumsi produksi sampah adalah sebagai berikut:

- a. Sampah dari permukiman 2 liter/orang/hari
- b. Pasar 0,4 liter/orang/hari terhadap 25% penduduk
- c. Kantor 0,1 liter/orang/hari terhadap 10% penduduk
- d. Jalan 0,2 liter/orang/hari terhadap 10% penduduk
- e. Toko 0,2 liter/orang/hari terhadap 10% penduduk

9. Listrik

Ketenagalistrikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ialah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan yang dimaksud tenaga listrik ialah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Pembangkit listrik merupakan produsen tenaga listrik yang dilakukan di pusat tenaga listrik dengan mempergunakan penggerak mula atau generator. Transmisi merupakan pemindahan tenaga listrik dari pusat tenaga listrik ke gardu induk yang terletak berdekatan dengan suatu pemakaian seperti kota atau kawasan industri. Sistem distribusi kemudian ke para pemakai/konsumen.

Indikator penilaian pelayanan listrik dapat dilihat dari variabel-variabel cakupan pelayanan dan kualitas pelayanan. Indikator cakupan pelayanan dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu jumlah penduduk terlayani dibandingkan dengan total jumlah penduduk kota, atau luas jangkauan pelayanan dibandingkan dengan luas wilayah kota. Indikator kualitas pelayanan, dapat dilihat dari frekuensi listrik padam pada wilayah tersebut. (Retno, 2007). Adapun asumsi kebutuhan listrik pada suatu kawasan adalah sebagai berikut:

- a. Tiap Kepala Keluarga (KK) diasumsikan membutuhkan energi listrik antara 1900 VA sampai dengan 2.200 VA.

Untuk fasilitas sosial dan ekonomi diasumsikan membutuhkan energi listrik sebesar 50% dari kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk



kebutuhan penerangan jalan diasumsikan 10% dari kebutuhan rumah tangga.

2.3 Studi Banding

2.3.1 Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas secara administrasi terletak di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi kawasan minapolitan berada di Kecamatan Kadung Bandeng, Kecamatan Batu, Kecamatan Batu Raden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sukoraja, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemrajen, Kecamatan Cilongok, dan Kecamatan Ajibarang dengan komoditas unggulan Gurame. Pendampingan teknologi di kawasan minapolitan Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh BBPBAT Sukabumi.

Penetapan lokasi minapolitan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 523/673/2008 dan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 523/674/2008.

Sentral pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Kawasan Pembenihan

Pengembangan kawasan pembenihan yang menjadi pusat pengembangan terdapat di Kecamatan Kedung Bantaeng dan wilayah lainnya sebagai penyangga yaitu Kecamatan Karang Lawas dan Batu Raden.

2. Kawasan Pembesaran

Pengembangan kawasan pembesaran yang menjadi pusat pengembangan terdapat di Kecamatan Kembaran dengan Kawasan penyangga. Kecamatan Sumbang dan Kemrajen.

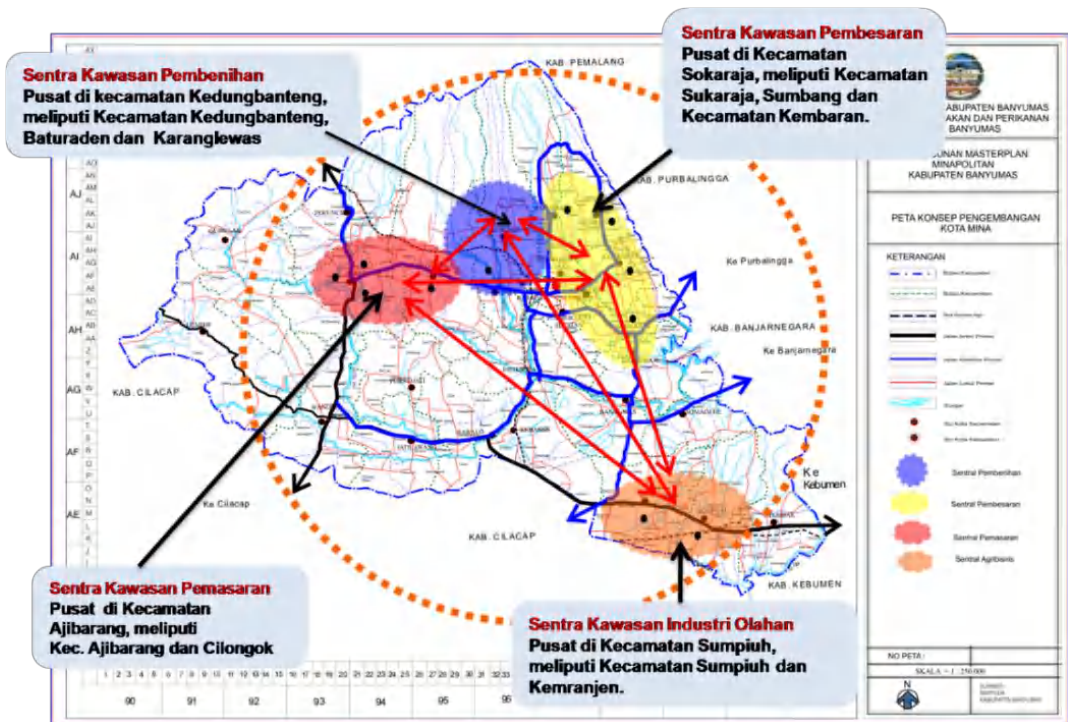
3. Kawasan Pengolahan

Pengembangan kawasan pengolahan yang menjadi pusat pengembangan yakni di Kecamatan Sumpuh dengan sentral pengembangan mencakup Kecamatan Kemrajen.

Kawasan Pemasaran

Pengembangan kawasan pemasaran dipusatkan di Kecamatan Ajibarang dan wilayah pengembangan di Kecamatan Cilongok.





Gambar 2.2 Peta Zonasi Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas
 Sumber: <http://thlbanyumas.com/2013/05/program-pengembangan-kawasan.html>
 Sarana dan prasarana yang ada di kawasan minapolitan Kabupaten

Banyumas, sebagai berikut:

1) Unit Produksi

Unit produksi yang terdapat di Kabupaten Banyumas serta luas lahan unit produksi, sebagai berikut:

- a) BBI (Balai Benih Ikan) TAMBAKSOGRA luas 2 Ha, 20 unit kolam
- b) BBI (Balai Benih Ikan) SINGASARI luas 2 Ha, 19 unit kolam
- c) BBI (Balai Benih Ikan) PANDAK luas 1,7 Ha, 21 unit kolam
- d) BBI (Balai Benih Ikan) Sidabowa luas 1,2 Ha

2) Pasar

Sarana pemasaran yang terdapat di Kabupaten Banyumas, sebagai berikut 3 pasar ikan dan 8 pasar tradisional.

3) Pengairan

Sarana pengairan yang terdapat di Kabupaten Banyumas serta luas lahan yang ada, yaitu, sebagai berikut:

Saluran induk (primer) dengan luas 181.030 m



- b) Saluran Sekunder dengan luas 229.772 m
- c) Luas areal potensial 15.003,92 Ha
- d) Luas areal fungsional 14.678,12 Ha

2.3.2 Kawasan Minapolitan Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang terdapat 18 sungai besar dan 17 sungai kecil dengan 5 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) sepanjang 835 km. Sungai tersebut bermuara di Samudra Indonesia dan Selat Sunda. Pandeglang merupakan wilayah pesisir dengan panjang pantai 307 Km dan yang dapat dimanfaatkan diluar kawasan lindung sepanjang 240 km.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.35 Tahun 2008 menetapkan Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu kawasan strategis minapolitan dengan Produksi perikanan unggulan berasal dari Perikanan budidaya air tawar yaitu Ikan Mas, Nila, Gurame, Lele dll. Sedangkan komoditas perikanan budidaya air payau terdiri dari udang dan bandeng, Komoditas Budidaya Air Laut terdiri dari Ikan Kerapu, Kerang Hijau, dan Rumput Laut.

Adapun Arahan Rencana Struktur Ruang Kawasan Minapolitan di Kecamatan Panimbang dan Sumur:

- a. Wilayah pengembangan dan pusat pelayanan.
- b. Distribusi penduduk.
- c. Penempatan fasilitas perkotaan dan kawasan pada setiap pusat pelayanan.
- d. Pengaturan sistem transportasi.
- e. Pengembangan Struktur Ruang Minapolitan.

Wilayah pengembangan dan pusat pelayanan kawasan minapolitan. Penentuan batas Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) berdasarkan pertimbangan:

1. Fungsi dan dominasi kegiatan tertentu di beberapa kawasan
2. Kesamaan peruntukan lahan
 - Kesamaan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan
 - Ukuran geometris/ luas kawasan
 - Batasan fisik dan administrasi desa



6. Kemampuan dan jangkauan pelayanan komponen kegiatan tertentu.
7. Struktur tata ruang yang dituju
8. Satu unit lingkungan SKP dapat Menampung 10.000 – 20.000 penduduk.

Pengembangan pola ruang kawasan minapolitan diantaranya yaitu:

1. Pola Ruang Inti

Rencana pola ruang inti merupakan kegiatan fungsi primer, skala pelayanan regional, mengakomodasi kebutuhan penduduk Kawasan Minapolitan, dan mendukung kegiatan wilayah secara keseluruhan mewakili Pandeglang Tengah dan Pandeglang Selatan.

- a. Pusat Utama Kegiatan Minapolitan

Untuk mendorong pengembangan kawasan minapolitan maka dibutuhkan sebuah kegiatan utama kawasan (Kecamatan Panimbang dan Sumur) yang merupakan pusat koleksi dan distribusi kegiatan produksi kegiatan perikanan dan sekaligus sebagai pusat utama kawasan yang dalam hal ini adalah Pusat Pelayanan Wilayah Promosi (PKWp) Panimbang.

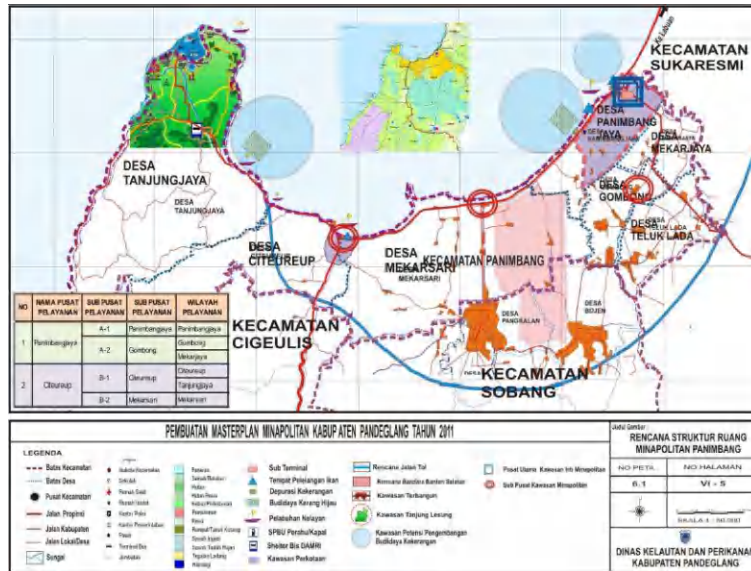
- b. Pusat Penunjang Kegiatan Minapolitan

Untuk mendukung dan menunjang kawasan minapolitan maka dibutuhkan sebuah Pusat Kegiatan Penunjang Kawasan (Kecamatan Sumur) yang merupakan pusat koleksi dan distribusi kegiatan produksi kegiatan perikanan dan sekaligus sebagai Sub Pusat Kawasan Kota Sumur adalah sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sumur.

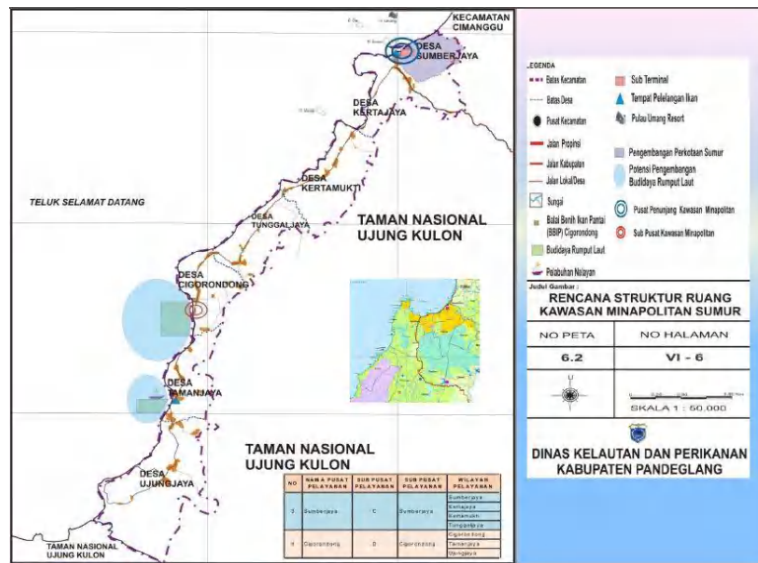
2. Pola Ruang Kawasan Penunjang

Rencana pola ruang untuk kawasan penunjang adalah kegiatan yang lingkup pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kawasan Minapolitan (internal). Dalam arti kegiatan atau fasilitas tersebut mempunyai skala pelayanan lokal di Kawasan Minapolitan.





Gambar 2.3 Rencana Struktur Ruang Minapolitan Panimbang
 Sumber: Masterplan Kawasan Minapolitan Pandeglang



Gambar 2.4 Rencana Struktur Ruang Kawasan Minapolitan Sumur
 Sumber: Masterplan Kawasan Minapolitan Pandeglang

Tabel 2.1

Arahan Pengembangan Struktur Ruang Kawasan Minapolitan Kecamatan Panimbang – Sumur

No	Kecamatan	Fungsi RTRW Kabupaten Pandeglang Dan RDTR Panimbang-Sobang	Rencana Kawasan Minapolitan		
			Fungsi Utama Kawasan	Komponen Inti	Komponen Penunjang
1.	Panimbang	1. Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi (PLWp) 2. Pusat pengembangan Pariwisata Tanjung. Lesung 3. Pusat pengembang Pariwisata Tanjung. Lesung 4. Pengembangan Bandara Banten Selatan 5. Pusat Perdagangan Regional 6. Pusat Pengembangan Kelautan	1. Pengembangan Kegiatan Perikanan Tangkap 2. Pengembangan Kegiatan Perikanan Budidaya 3. Pengembangan Industri Pengolahan/ Pengalengan Ikan 4. Pengembangan Industri Pakan 5. Pengembangan Destinasi Wisata 6. Pengembangan Permukiman Perkotaan	1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 2. Pasar Ikan Terpadu 3. Industri Pengolahan/Pengalengan Ikan 4. Industri Pakan 5. Pusat Kuliner dan TIC 6. Pengembangan Kawasan Komersial 7. Pengembangan Permukiman Nelayan 8. Pengembangan Budidaya Kerang Hijau 9. Pengembangan Budidaya Rumput Laut 10. Pengembangan Budidaya Tembak	1. Pemerintahan 2. Perdagangan dan jasa 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5. Permukiman Perdesaaan 6. Kawasan Pertanian 7. Kawasan Pesisir Pantai 8. Kawasan Sempadan Sungai



No	Kecamatan	Fungsi RTRW Kabupaten Pandeglang dan RDTR Panimbang-Sobang	Rencana Kawasan Minapolitan		
			Fungsi Utama Kawasan	Komponen Inti	Komponen Penunjang
2.	Sumur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengembangan kawasan (PPK) 2. Pusat Pemerintah Kecamatan 3. Pusat Pengembangan Pariwisata Sumur 4. Pusat Pengembangan Budidaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kegiatan Perikanan Budidaya 2. Pengembangan Kegiatan Perikanan Tangkap 3. Pengembangan Industri Pengolahan hasil perikanan 4. Wisata Kuliner dan Rapat Area 5. Pengembangan Permukiman Perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3. Pasar Ikan 4. Jasa Perdagangan 5. Pusat Kuliner dan TIC 6. Industri Pengolahan Ikan 7. Pengembangan Budidaya Rumput Laut 8. Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Permukiman 5. Kawasan Pertanian 6. Kawasan Pesisir Pantai 7. Kawasan Sempadan Sungai

Sumber: Masterplan Minapolitan Kabupaten Pandeglang (Tahun 2012 – 2017)



Oleh karena itu, maka dari ketiga teknologi yang digunakan oleh tiap negara tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut (tabel 2.8).

Tabel 2.2 Kesimpulan Studi Banding

Kabupaten	Arahan Pemanfaatan Kawasan Minapolitan yang digunakan
Kabupaten Banyumas	Sentral pengembangan kawasan minapolitan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pembenihan 2. Kawasan pembesaran 3. Kawasan Pengolahan 4. Kawasan Pemasaran
Kabupaten Pandeglang	Zona-zona kawasan minapolitan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi utama kawasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kegiatan perikanan tangkap 2. Pengembangan kegiatan perikanan budidaya 3. Pengembangan industri pengolahan 4. Pembangunan industri pakan b. Komponen Inti <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3. Pasar ikan terpadu 4. Pengembangan permukiman nelayan 5. Pusat kuliner TIC



2.4 Studi Penelitian Terdahulu

1. Arahan Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Kabupaten Majene (Oleh Hamka Andika, 2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi komoditas basis yang potensial untuk dikembangkan pada perikanan tangkap di Kabupaten Majene dan mengetahui arah pengembangan kawasan sentra minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Majene serta merumuskan arahan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Kabupaten Majene. Fokus penelitian ini yaitu di Kabupaten Majene memiliki wilayah areal penangkapan luasnya mencapai 926 km².

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ) untuk melihat sektor perikanan basis dan analisis skalogram untuk perencanaan pusat pelayanan. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan peringkat permukiman, wilayah dan kelembagaan serta fasilitas pelayanan dan analisis SWOT untuk menentukan strategis sehingga dapat menghasilkan berbagai kemungkinan strategi dalam menganalisis.

Dari hasil analisa, didapat hasil bahwa sektor basis perikanan tangkap di Kabupaten Majene adalah Ikan Terbang, Ikan Tongkol, Ikan Layang, Ikan Campuran dan Ikan Cakalang. Berdasarkan hasil analisis skalogram arahan zonasi kawasan minapolitan di Kabupaten Majene dibagi atas empat zona pengembangan kawasan yaitu: 1) Zona Pengembangan Kota Tani Utama yang diarahkan di Kecamatan Banggae, 2) Zona pengembangan sentra produksi diarahkan di Kecamatan Sendana, 3) Penetapan zona hinterland. Diarahkan di Kecamatan Banggae Timur dan Kecamatan Malunda, 4) Zona Pemasaran (outlet) yaitu Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tummerodo, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Ulu Manda. Analisis SWOT tentang arahan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap maka ditemukan tiga alternatif arahan pengembangan yaitu: alternatif (1) peningkatan sarana dan prasarana pendukung minapolitan perikanan tangkap Kabupaten Majene, (2) Mengintensifkan fungsi lembaga dan infrastruktur yang ada dalam kawasan minapolitan dalam



rangka memfasilitasi dan meningkatkan animo masyarakat. (3) Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan harga.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Dalam Konsep Pengembangan Wilayah (Oleh Fatmawaty D, Ikawati, dan Erwin Amri, 2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah upaya meningkatkan keterkaitan pembangunan *interregional* berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (*rural-urban linkage*) yaitu pengembangan kawasan pedesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Fokus penelitian ini adalah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan luas wilayah 7.019 hektar.

Penelitian ini menggunakan metode analisis pengembangan wilayah berbasis perikanan yang dilakukan berupa identifikasi potensi dan masalah kawasan minapolitan. Hasil identifikasi isu dan masalah tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis potensi untuk pengembangan kawasan minapolitan menggunakan analisis SWOT. Tahapan kedua analisis yang dilakukan adalah identifikasi potensi yang ada di Kecamatan Pamboang. Potensi tersebut berupa jenis ikan yang termasuk kedalam komoditas unggulan, baik itu perikanan darat maupun perikanan tangkap. Analisis tahapan ini dilakukan dengan menggunakan metode LQ dan *supply chain* (analisis rantai pasokan). Penentuan strategi pengembangan wilayah dilakukan dengan mendeskripsikan hasil dari analisis yang telah dilakukan pada dua tahapan sebelumnya.

Dari hasil analisa, didapat hasil bahwa pengembangan sentra produksi komoditi unggulan berbasis teknologi untuk meningkatkan produksi komoditi-komoditi perikanan yang memiliki daya saing pasar tinggi. Pengembangan jaringan pemasaran berbasis teknologi informasi: 1) program pengembangan pusat informasi pasar pembuatan pasar ikan yang representatif; peningkatan jaringan arus informasi dari sentra produksi ke pusat informasi pasar untuk dapat

oleh masyarakat luas, 2) program pengembangan sumberdaya manusia; dan bagi petugas teknis perikanan dan pelaku usaha tentang operasional pemanfaatan teknologi informasi. Program pengembangan Wisatamina dilakukan

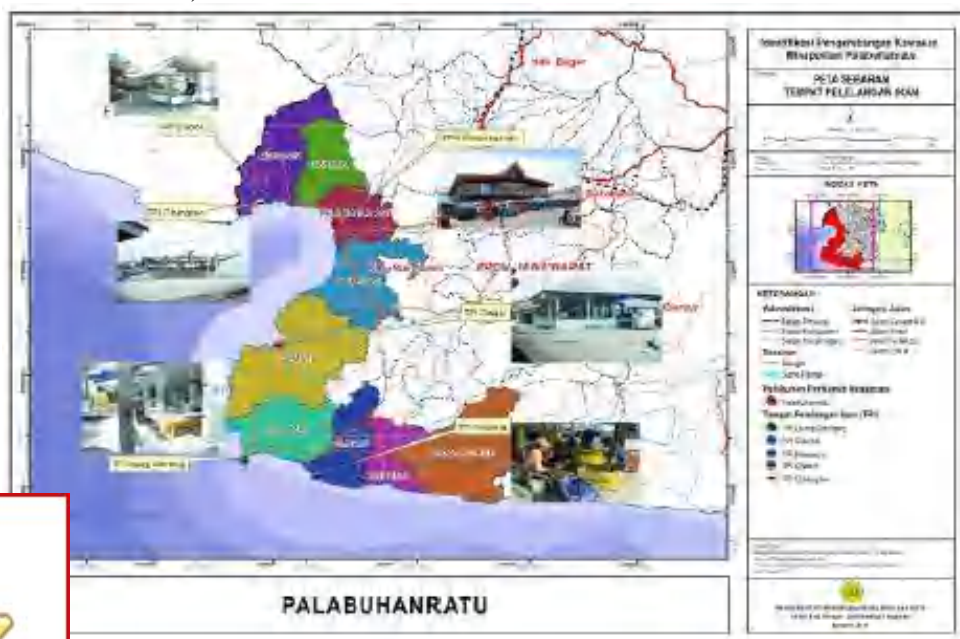


dengan pengembangan kawasan perkolaman dan BBI (Balai Benih Ikan) Kabupaten Majene sebagai lokasi wisatamina; penataan kawasan perkolaman, pengembangan sarana wisatamina, pengembangan koleksi seluruh jenis ikan air tawar, pengembangan promosi perikanan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarannya. Program pengembangan produk olahan perikanan dilakukan dengan pengembangan industri rumah tangga, program pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal, dan program pengembangan produk olahan ikan menggunakan lele sabagai bahan substitusi.

3. Identifikasi Potensi dan Kendala Kawasan Minapolitan Pelabuhan Ratu (Oleh Geri Nugraha, Indarti Komala Dewi, dan Agus Sunaryadi, 2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan kendala pengembangan kawasan minapolitan. Fokus penelitian ini adalah kawasan minapolitan pelabuhanratu.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan gambaran umum kawasan minapolitan perikanan tangkap yang didukung dengan alat statistik deskriptif seperti tabel, diagram maupun foto mapping. Analisis LQ (*Location Quetion*) untuk mengetahui tingkat kontribusi masing-masing sub sektor terhadap pembentukan kekayaan daerah (dalam Fadillah Achmad).



Gambar 2.5 Peta Zona Inti Minapolitan Pelabuhanratu
 Sumber: Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik-Universitas Pakuan



Dari hasil analisa, didapat hasil bahwa Pelabuhanratu merupakan kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap. Namun hingga saat ini masih terdapat beberapa masalah dalam pengembangannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keterkaitan antar sistem dan mata rantai produksi hulu dan hilir serta fasilitas penunjang belum optimal dan belum terdapat sentra pengembangan. Dengan demikian, dibutuhkan arahan pengembangan kawasan minapolitan yaitu pengembangan struktur ruang kawasan minapolitan dan pengembangan kegiatan perikanan dari hulu hingga hilir.

4. Pengembangan Kawasan Minapolitan (Studi Kasus: Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap) (Oleh Yuliarti Dian Pancawati, 2015)

Tujuan dari Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan arahan pengembangan kawasan minapolitan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap. Fokus penelitian ini pelabuhan perikanan Samudra Cilacap.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik subsistem hulu, subsistem hilir, dan subsistem penunjang kawasan minapolitan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Analisis SWOT menggunakan bagan dan matriks SWOT, digunakan untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan minapolitan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.

Dari hasil analisa, didapat hasil bahwa Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap sebagai zona inti minapolitan berbasis perikanan tangkap diharapkan berdampak positif untuk pengembangan ekonomi di Kabupaten Cilacap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan minapolitan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap belum optimal karena baru terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana minapolitan, belum keterkaitan menyeluruh antara subsistem hulu, subsistem hilir, dan subsistem penunjang kawasan minapolitan. Kendala dalam pelaksanaan minapolitan yaitu koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pengembangan kawasan

minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Cilacap, baik dari pemerintah dalam yaitu Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola sumber Daya Kawasan Anakan (DKP2SKSA) Kabupaten Cilacap dan Pelabuhan Perikanan



Samudera Cilacap Selaku Tim Pokja Minapolitan. Dengan demikian, dibutuhkan arahan pengembang kawasan minapolitan yaitu pengembangan kegiatan perikanan dari hulu hingga ke hilir dengan memanfaatkan potensi dan sarana prasarana/fasilitas yang dimiliki.

5. Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan (Oleh Darmawan L Cahya, Muhammad Daniel Mareza, 2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun konsep pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang. Fokus penelitian ini adalah Kawasan Minapolitan Ketapang dan Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam hal ini penelitian menitikberatkan pada penataan kawasan minapolitan dilihat dari aspek fisik dan lingkungan, sosial kependudukan, perekonomian dan sarana dan prasarana. Adapun permasalahan yang dianalisis dalam pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang di Lampung Selatan dibagi menjadi dua faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik di lihat dari aksesibilitas, kondisi fisik lingkungan, dan sarana dan prasarana, serta faktor non fisik dilihat dari segi faktor kependudukan dan faktor perekonomian. Identifikasi dan analisis permasalahan dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran kriteria pengembangan di lokasi penelitian telah diperoleh.

Dari hasil analisa, didapat hasil bahwa Kawasan Minapolitan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan memiliki aksesibilitas dan kondisi fisik lingkungan yang baik serta sesuai untuk mendukung kegiatan minapolitan, Kawasan Minapolitan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya. Dengan komoditas unggulan ikan laut, rumput laut, udang dan ikan kerapu, serta tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah dari sektor perikanan karena belum adanya strategi pengolahan dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan nilai jual dari komoditas perikanan.

sarana dan prasarana yang ada belum mencukupi kebutuhan penduduk dan perencanaan minapolitan Ketapang untuk mendukung agrominapolitan. Pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang dibangun dengan konsep



Mixed Use Development yang diarahkan pada kegiatan budidaya, penangkapan ikan, industri pengolahan dan pemasaran produk.



Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

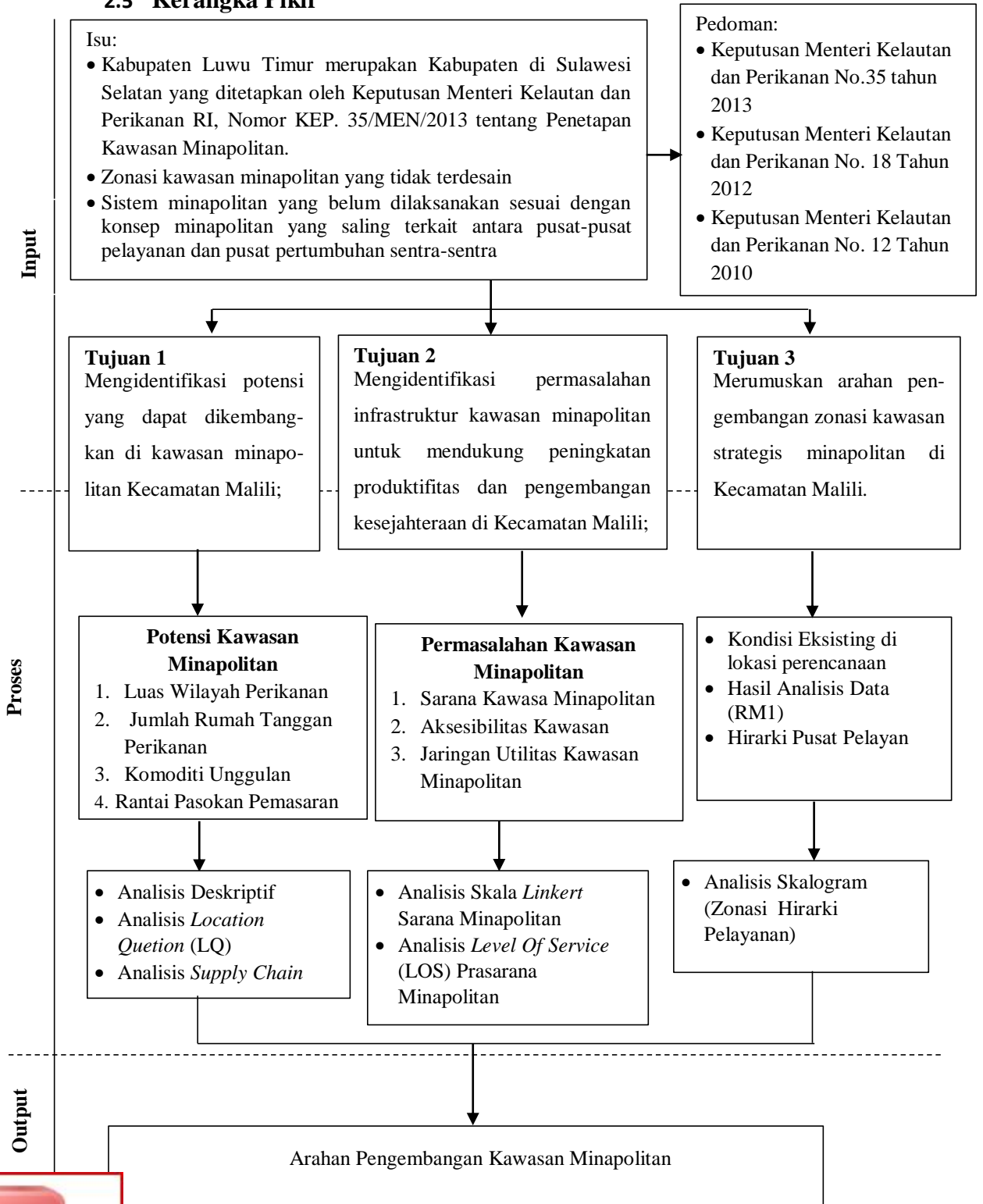
No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Metode	Hasil	Sumber
1.	Hamka Andika	Arahan Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Kabupaten Majene	2013	1. Analisis LQ 2. Analisis Skalogram 3. Analisis SWOT	Hasil Analisis: 1. Berdasarkan analisis LQ komoditas basis perikanan tangkap adalah ikan terbang, ikan tongkol, ikan layang, ikan campurang dan ikan cakalang berpotensi untuk ekspor luar negeri. 2. Berdasarkan hasil analisis skalogram terdapat empat zona yaitu: zona pengembangan kota tani utama, Zona pengembangan sentra produksi, zona hinterland dan zona pemasaran	Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
2.	Fatmawati D, Ikawati, dan Erwin Amri	Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Dalam Konsep Pengembangan Wilayah	2018	1. Analisis SWOT 2. Analisis LQ dan Analisis Supply Chain	1. Menentukan prioritas pengembangan di suatu wilayah yang harus disusun secara terstruktur dalam sistem perencanaan 2. Arahan strategi dalam pengembangan komoditas unggulan diantaranya meningkatkan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi dan promosi, peningkatan SDM dan kelembagaan, teknologi tepat guna serta terbangunnya fasilitas fisik minapolitan	Jurnal Plano Madani Vol.7 No.1 (2018) ISSN 2541-2973



No	Penulis	Judul	Tahun	Metode	Hasil	Sumber
3.	Geri Nugraha, Indarti Komala Dewi, Agus Sunaryadi	Identifikasi Potensi dan Kendala Kawasan Minapolitan Pelabuhan Ratu	2015	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Dari Hasil Penelitian keterkaitan antar sistem dan mata rantai produksi hulu dan hilir serta fasilitas penunjang belum optimal dan belum terdapat sentra pengembangan. Dengan demikian dibutuhkan arahan pengembangan struktur ruang kawasan minapolitan dan pengembangan kegiatan perikanan dari hulu hingga hilir	Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik-Universitas Pakuan
4.	Yuliarti Dian Pancawati	Pengembangan Kawasan Minapolitan (Studi Kasus: Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)	2015	Analisis Deskriptif dan Analisis SWOT	Hasil Rekomendasi: 1. Arahan Rekomendasi subsistem hulu 2. Arahan Rekomendasi subsistem hilir 3. Arahan Rekomendasi subsistem penunjang	Jurnal Biro Penerbit Planologi Undip Vol. 11 (3): 364-375 September 2015
5.	Darmawan L Cahya dan Muhammad Daniel Mareza	Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan	2013	Analisis Kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian: 1. Memiliki aksesibilitas dan kondisi fisik lingkungan yang baik serta sesuai untuk mendukung kegiatan minapolitan 2. Memiliki potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya. Dengan komoditi unggulan ikan laut, rumput laut, udang dan ikan kerapu 3. Tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah dari sektor perikanan 4. Sarana dan prasarana yang belum memenuhi kebutuhan penduduk	Jurnal Planesa Vol.4, No.2 November 2013 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul



2.5 Kerangka Pikir



Gambar 2.6 Kerangka Pikir